

LAPORAN KINERJA KOMISI A
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2025

Jumat, 21 Maret 2025

Yang terhormat Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Yang saya hormati Sdr. rekan-rekan Anggota DPRD Kota Salatiga.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Internal DPRD yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf k Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengamanahkan bahwa Komisi mempunyai tugas memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada hari ini kami laporkan kinerja bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 sebagai berikut:

A. Kinerja bulan Januari 2025

1. Kunjungan lapangan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga terkait Program Peningkatan Literasi Minat Baca kepada Masyarakat pada tanggal 7 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan dengan space area terbuka yang dioptimalkan untuk taman baca dan safari mini menambah kualitas layanan di Perpustakaan Daerah;
 - b. Pada tahun ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan fokus pada penelusuran naskah kuno dan naskah sumber arsip;
 - c. Guna peningkatan pelayanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengembangkan inovasi berupa Salatiga Virtual Library tour dengan menggunakan VR, akses online moca moco bekerjasama dengan Tiga Serangkai, dan Sinisa;
 - d. Pada tahun ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuat DED diorama museum sejarah Salatiga, yang selanjutnya pada tahun 2026 mulai tahap pembangunan.

2. Rapat dengar pendapat Komisi A dengan BKPSDM Kota Salatiga terkait Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tanggal 8 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Menindaklanjuti SE Wali Kota Salatiga maka terhadap THL di Kota Salatiga Pemerintah Kota tidak ada pemutusan hubungan kerja besar-besaran, tidak akan mengurangi pendapatan, tidak ada pembengkakan anggaran dan pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Terkait pegawai non ASN yang diberhentikan per tanggal 1 Januari 2025 karena factor usia, BKPSDM telah menyampaikan kepada Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing OPD sejak bulan Maret 2024;
 - c. THL yang tidak masuk dalam seleksi P3K kemarin masuk dalam P3K Paruh Waktu;
 - d. Dalam rangka penanganan tenaga non ASN telah dibentuk Tim Pertimbangan Penyusunan Kebutuhan ASN yang di ketuai oleh Sekda dengan anggota dari BKPSDM, Bappeda, DKK, Inspektorat, dan Bagian Hukum. Tim tersebut akan segera menyampaikan hasil kinerjanya kepada Komisi A.
3. Rapat dengar pendapat Komisi A dengan RSUD Kota Salatiga terkait materi Penyusunan Raperda BLUD pada tanggal 10 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Januari 2025 RSUD akan melaksanakan kajian terkait penyusunan Raperda BLUD termasuk didalamnya mengatur tentang kerjasama dengan perusahaan;
 - b. Penggunaan Silpa di RSUD akan digunakan secara khusus untuk investasi, sementara ini masih menggunakan payung hukum berupa Perwali Penatausahaan Keuangan;
 - c. Guna mengurangi antrean RSUD bekerjasama dengan Jeg Boy dalam pengantaran obat. Kerjasama tersebut setiap bulan RSUD mendapatkan pemasukan sebesar 1,2 sampai 1,3 juta rupiah;
 - d. Disarankan kepada RSUD untuk melakukan survey ke RSUD lain;
 - e. Perlu dilaksanakan evaluasi pelayanan RSUD.
4. Kunjungan kerja Komisi A bersama Ketua DPRD ke Dinas Perpusda Provinsi DIY dan DPRD Kab. Sleman terkait DED Museum Diorama dan Naskah Kuno pada tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 16 Januari 2025 dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
 - a. Sebelum pembuatan DED Diorama harus diawali dengan pengumpulan story land agar pembuatan DED lebih fokus dalam perencanaan;
 - b. Guna memperoleh hasil yang maksimal, maka pembuatan studio diorama perlu dilakukan lelang dikecualikan karena mengintegrasikan antara

teknologi informasi, visual, audio, lighting yang mana teknologi tersebut dapat terintegrasi secara otomatis.

5. Kunjungan kerja Komisi A ke Perpustakaan RI dan DPRD Prov. DKI Jakarta terkait DED Museum Diorama dan Naskah Kuno pada tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 25 Januari 2025 dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 Perpustakaan Nasional RI memiliki Dana Dekonsentrasi untuk Provinsi dan DAK untuk Kabupaten-Kota;
 - b. Perpustakaan Nasional RI juga akan menyelenggarakan Festival Perang Jawa di beberapa daerah seperti di Makasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk daerah Jawa Tengah akan diselenggarakan di Kota Yogyakarta;
 - c. Penyelenggaraan Pamaren Seminar yang diselenggarakan di Pusat;\
 - d. Perpustakaan RI akan melakukan pemilahan untuk Arsip di bawah 50 tahun dan untuk Naskah Kuno di atas 20 tahun.
 6. Kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon terkait Penganggaran Makan Bergizi Gratis pada tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
 - a. makan bergizi gratis dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional dengan mekanisme dibentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
 - b. Guna efektivitas waktu dalam pelayanan maka idealnya SPPG dibentuk dalam radius 3 km dari sekolah;
 - c. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah memberikan data dan koordinasi lintas sektor;
 - d. Pengawasan kualitas makanan dilaksanakan langsung oleh Badan Gizi Nasional.
- B. Kinerja bulan Februari 2025
1. Kunjungan Lapangan ke Dinas Pendidikan terkait Persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tanggal 4 Februari 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Kunjungan Kerja Komisi A ke Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan DPRD Kab. Cirebon pada tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Dinas Pendidikan hanya menyiapkan data;
 - b. Komisi A akan ikut mendorong fasilitasi pendampingan koordinasi dengan BGN;
 - c. Terkait pemeliharaan gedung sekolah, Dinas Pendidikan mengharapkan ada anggaran khusus untuk pemeliharaan Gedung sekolah;

- d. Pengangkatan dan mutasi Kepala Sekolah diharapkan menjadi ranah Dinas Pendidikan;
 - e. Sistem penerimaan siswa baru tahun ini akan berganti dari PPDB menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Siswa Baru);
 - f. Perlu adanya diskusi dengan Dewan Pendidikan terkait sekolah inklusi;
 - g. Komisi A akan melaksanakan kunjungan lapangan ke sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan fisik.
2. Rapat dengar pendapat Komisi A dengan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 3 Februari 2025 terkait penggunaan logo Pemkot dalam Kegiatan Wayangan, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Diskominfo telah meminta EO guna menghapus logo Pemkot dan Pj Wali Kota telah menegur secara lisan;
 - b. Terkait semrawutnya kabel fiber optic, Dinas Kominfo tidak mengetahui karena asset berada dibawah DPU untuk pengelolaan trotoar;
 - c. Dalam rangka menangani permasalahan kabel provider, Perda Kota Salatiga nomor 30 Tahun 2018 tentang e-Government belum bisa mewadahi pengaturan dan penindakannya.
 3. Komisi A yang melaksanakan tugas sebagai Pansus I melaksanakan finalisasi Raperda tentang Perlindungan Anak melaksanakan rapat dengar pendapat Pansus pada tanggal 5 Februari 2025;
 4. Rapat dengar pendapat Komisi A dengan Asisten 1, Asisten 2, BKPSDM, BPKPD, dan Bagian Hukum pada tanggal 6 Februari 2025 terkait Penyelesaian Tenaga Non ASN (menindaklanjuti rapat tanggal 6 Januari 2025), dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Telah dibentuk tim penanganan tenaga non ASN yang bertugas untuk menganalisis yang saat ini sedang berproses;
 - b. THL yang tidak lolos seleksi P3K akan menjadi tenaga paruh waktu;
 - c. Jumlah THL mengalami penurunan dari 1365 orang menjadi 1255 orang karena mengundurkan diri, meninggal, dan pensiun;
 - d. Komisi A akan meminta kajian terkait dan akan mengundang paguyuban THL.
 5. Kunjungan Lapangan ke RSUD Kota Salatiga terkait Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit pada tanggal 7 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dokter yang sudah memasuki usia pensiun yang masih bermitra dengan RSUD sejumlah 20 dokter;
 - b. Penyesuaian tarif RSUD akan dikoordinasikan dengan Bagian Hukum, untuk itu RSUD telah meminta izin kepada Wali Kota untuk penetapan tarif;
 - c. Akan dilakukan studi banding dengan RSUD lain guna peningkatan pelayanan.

6. Kunjungan Kerja ke Dinas Kesehatan Bantul dan DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 10 sampai dengan 13 Februari 2025 dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaan ILP menggunakan aplikasi SIMPUS guna pencatatan pelayanan ILP;
 - b. Pelayanan ILP menggunakan pendekatan pelayanan yang humanis, dan ada reward untuk kader ILP;
 - c. Posyandu telah dimasukkan dalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
 - d. Sekarang ini Dinas Kesehatan Kab. Bantul sedang mengembangkan DGSV3 yang terhubung dengan Kementerian Kesehatan.
7. Kunjungan Lapangan Komisi A ke Dinas Kesehatan Kota Salatiga pada tanggal 17 Februari 2025 sebagai tindak lanjut kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kab. Bantul dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pelayanan di Puskesmas harus ada tambahan psikolog;
 - b. Jumlah Posyandu ILP di Kota Salatiga saat ini ada 213 Posyandu, diharapkan ada 1 Posyandu dalam 1 RW di Kota Salatiga;
 - c. Puskesmas sekarang ini menjadi rawat jalan bukan rawat inap lagi;
 - d. Program Cek Kesehatan Gratis sudah dimulai melalui aplikasi Satu Sehat;
 - e. Perlu perhatian dalam penanganan stunting yang saat ini mencapai angka prevalensi 14.02%.
8. Komisi A yang melaksanakan tugas sebagai Pansus I dalam Pembahasan Raperda tentang Pemekaran Wilayah Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh telah melaksanakan rapat dengar pendapat Pansus pada tanggal 14 Februari 2025 dan finalisasi Raperda pada tanggal 17 Februari 2025;
9. Kunjungan kerja Komisi A ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta dan DPRD Kab. Bantul pada tanggal 17 sampai dengan 20 Februari 2025 terkait Pengelolaan Kabel Fiber Optik dan Penanganan Kabel Provider dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
 - a. Penanganan kabel optic dan kabel provider di Kota Yogyakarta menggunakan Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif. Disamping itu menggunakan Perwali Nomor 15 Tahun 2023;
 - b. Dalam menata kabel optic, Dinas Kominfo Kota Yogyakarta banyak menggunakan CSR berupa sarana dan prasarana;
 - c. Metode yang digunakan dalam penataan tersebut menggunakan ducting u-ditch yang dilaksanakan melalui bawah tanah menggunakan saluran air hujan. Sementara itu apabila tidak memungkinkan, maka akan lewat atap yang dirapikan dengan contoh ada di Kawasan Malioboro;

- d. Penegakan Perda dilaksanakan oleh Dinas Kominfo bersama dengan Satpol PP;
 - e. Dibentuk tim P3IPT melalui SK Wali Kota Yogyakarta yang bertugas dalam mengelola kegiatan tersebut.
10. Rapat dengar pendapat Komisi A dengan Satpol PP terkait kegiatan tahun 2025 pada tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Telah dilaksanakan penanganan pengamen jalanan melalui sistem denda dan penyitaan alat music;
 - b. Satpol PP mengajukan anggaran untuk mobil pemadam kebakaran yang saat ini kondisinya sudah tua;
 - c. Perlu digiatkan sosialisasi Perda kepada masyarakat, untuk itu Komisi A akan mendukung kegiatan tersebut agar ketertiban di masyarakat semakin meningkat.
11. Rapat dengar pendapat Komisi A dengan Sekretariat DPRD terkait Kearsipan pada tanggal 24 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Setwan akan menggunakan aplikasi Srikandi;
 - b. Akan dilakukan bimbingan oleh Dinas Perpustakaan terkait pengarsipan;
 - c. Dinas Perpustakaan menyarankan Setwan menggunakan jasa perorangan dalam memilah dan memilih arsip sebagai awal pengarsipan.
12. Rapat dengar pendapat Komisi A bersama Ketua DPRD dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, DP3AP2KB, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan membahas literasi dan program Sinisa pada tanggal 27 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Perlu dilaksanakan penyusunan Raperda tentang Salatiga Kota Literasi;
 - b. OPD siap mendukung Sinisa dalam program kerjanya;
 - c. Sebagai pilot project, Sinisa akan hadir di 3 ILP per kecamatan yang akan di launching setelah Idhul Fitri.
- C. Kinerja bulan Maret 2025
1. Kunjungan Lapangan ke DP3AP2KB terkait UPT PPA DP3AP2KB tanggal 4 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Pendirian UPT PPA merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan pada bulan Mei 2025 harus berdiri UPT PPA;
 - b. Dalam penanganan kekerasan terhadap anak, dibutuhkan pula trauma center untuk pusat rehabilitasi korban kekerasan;
 - c. Perlunya sinergitas penurunan stunting di Kota Salatiga;
 - d. Sehubungan dengan permasalahan pendirian UPT PPA, maka akan dilaksanakan rapat dengar pendapat dengan Asisten 1, Asisten 2, DP3AP2KB, BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum.

2. Kunjungan lapangan Komisi A ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga terkait Persiapan Disdukcapil dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan akibat Pemekaran Wilayah Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh pada tanggal 5 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Disdukcapil memerlukan tambahan SDM, sarana prasarana, dan anggaran mengingat banyaknya dokumen kependudukan yang akan diubah;
 - b. Tim Advokasi yang akan dibentuk dalam pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh diharapkan benar-benar memahami prosedur dan peraturan dalam penerbitan dokumen kependudukan, karena di perkirakan akan terjadi banyak masalah terutama terkait perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
 - c. Ketersediaan blangko cukup mengkhawatirkan, karena tergerus oleh pelayanan perubahan dokumen kependudukan karena pemekaran RT dan RW, sedangkan pengadaan harus langsung dari Pemerintah Pusat;
3. Komisi A yang melaksanakan tugas sebagai Pansus I dalam Pembahasan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung telah melaksanakan rapat dengar pendapat Pansus terkait finalisasi raperda terkait pada tanggal 6 Maret 2025;
4. Kunjungan kerja Komisi A ke DPUPR Kota Madiun dan DPRD Kab. Madiun terkait Penataan Jaringan Kabel Fiber Optik dan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pada tanggal 10 sampai dengan 13 Maret 2025 dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
 - a. Penertiban kabel FO dilaksanakan bersama-sama antara DPUPR, Diskominfo, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP;
 - b. Arahan dari Wali Kota untuk pemasangan kabel FO harus izin terlebih dahulu kepada Kominfo dan DPUPR.
5. Rapat dengar pendapat Komisi A, Komisi B, dan Wakil Ketua DPRD dengan RSUD Kota Salatiga terkait Optimalisasi PAD BLUD RSUD Kota Salatiga pada tanggal 14 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Perlu optimalisasi pelayanan RSUD;
 - b. RSUD akan mengirimkan data komprehensif belanja dan pendapatan baik pelayanan maupun non pelayanan karena akan memanfaatkan Silpa;
 - c. Perlu adanya kajian terkait dana Cadangan RSUD;
 - d. Komisi A akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan RSUD yang menghadirkan penyusun kajian;
 - e. RSUD akan mengirimkan daftar dokter dan remunerasi termasuk jam kerja.
6. Rapat dengar pendapat Komisi A dengan DP3AP2KB, BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum terkait Tindak Lanjut Pendirian UPT PPA pada tanggal 17 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pendirian UPT PPA telah dikoordinasikan pada tanggal 12 Maret 2025 di Ruang Rapat Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda;
 - b. Pendirian UPT PPA telah di kirimkan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Posisi saat ini menunggu kunjungan lapangan dari Biro Organisasi Setda Provinsi karena harus ada Analisa sarana prasarana, SDM, dan anggaran yang harus masuk dalam Renstra dan RPJMD;
 - c. UPT PPA masih dikaji oleh BKPSDM akan masuk kedalam kelas berapa. Untuk itu BKPSDM hasil rapat dengan Tim TPK akan diusulkan ke BKN serta pertimbangan teknis akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan sebelum Mei keputusan sudah turun;
 - d. Hasil kajian pembentukan UPT PPA akan dikirimkan DP3AP2KB kepada Komisi A untuk dipelajari, sementara proses akan terus berlanjut.
7. Kunjungan kerja Komisi A ke DPRD Kota Cirebon dan DPRD Kab. Cirebon terkait Penanganan Kerusakan Sarana dan Prasarana Sekolah Tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2025 dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
- a. Dilaksanakan skala prioritas mengingat banyaknya sarana prasarana sekolah yang mengalami kerusakan dalam kategori ringan, sedang, dan berat;
 - b. Optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - c. DPRD Kota Cirebon merekomendasikan penambahan anggaran BOSDA dari APBD untuk menangani kekurangan operasional sekolah.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Internal DPRD yang saya hormati,

Berdasarkan kinerja Komisi A tersebut, berikut kami sampaikan rekomendasi Komisi A sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi perlindungan anak terutama terhadap kekerasan seksual yang semakin meningkat, perlu akselerasi pembentukan UPT PPA pada DP3AP2KB;
2. Guna mendukung kesadaran masyarakat dalam budaya membaca sehingga akan meningkatkan angka literasi Kota Salatiga, maka perlu dilaksanakan Penyusunan Raperda tentang Salatiga Kota Literasi;
3. Dalam rangka penanganan permasalahan dan pengendalian kabel fiber optic, maka perlu dilaksanakan penyusunan Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Jaringan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
4. Optimalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP) guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Salatiga;

5. Menindaklanjuti angka prevalensi stunting yang cukup tinggi, membutuhkan sinergitas dalam penurunan kasus stunting dalam rangka menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045;
6. Optimalisasi pelayanan RSUD serta penyusunan Raperda tentang Pembentukan dan Pemanfaatan Dana Cadangan RSUD; dan
7. Perlu dilaksanakan evaluasi capaian dan pelaksanaan Renstra (lama) OPD mitra Komisi.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Internal DPRD yang saya hormati,

Demikian laporan kinerja Komisi A ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA KOMISI A
DPRD KOTA SALATIGA
WAKIL KETUA,

ANDREAS YOSEP KRISTIANTO